

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Membangun dan memperkokoh pelibatan kewarganegaraan keindonesiaan saat ini memiliki tantangan yang sangat besar terkait dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan sosial terjadi akibat kemudahan teknologi informasi dan komunikasi telah menggeser nilai-nilai kewarganegaraan keindonesian yang sangat bergelora di awal kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu semua elemen bangsa memiliki keinginan yang sama untuk membangun bangsa dan negara Indonesia di atas perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Fenomena perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat, tidak menjadi penghalang semua elemen bangsa untuk mengikatkan diri menjadi bangsa dan negara yang merdeka. Pada saat ini perbedaan-perbedaan tersebut menjadi isu yang sering dijadikan senjata oleh segolongan kelompok untuk kepentingan-kepentingan kelompoknya, sehingga mengikis nilai-nilai keindonesiaan yang dibangun di atas perbedaan tersebut. Fakta saat ini yaitu adanya fenomena perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat tersebut justru menjadikan nilai-nilai keindonesiaan memudar. Oleh karena itu pada saat ini perlu diupayakan bagaimana mengembalikan semangat membangun nilai keindonesiaan tersebut melalui pengokohan pelibatan kewarganegaraan kepada generasi muda khususnya mahasiswa (Rozi, 2009; Sardiman, 2010; Yaumi, 2010). Perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat, sebagai suatu keniscayaan dan bersifat *natural sunatullah* sudah ada sebelum bangsa dan negara Indonesia terbentuk. Pada saat ini yang perlu dibangun dan diupayakan dalam memahami perbedaan ini adalah membangun rasa kewarganegaraan keindonesiaan. Kewarganegaraan keindonesiaan pada saat ini dirasakan mengalami kemunduran karena telah jauh dari api revolusi dan semangat

kebangsaan negara Indonesia di awal kemerdekaan ketika memiliki keinginan yang sama untuk merebut kemerdekaan dari penjajah.

Terdapat banyak fakta di lapangan yang memperlihatkan dan memperjelas bahwa semangat kewarganegaraan keindonesiaan telah mengalami kemunduran seperti misalnya pencalonan seorang kepala daerah yang mengatasnamakan kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan rakyat dengan memunculkan isu perbedaan SARA untuk memperoleh dukungan, dalam memperoleh kekuasaan ada kerajaan keluarga di atas negara, korupsi berjamaah yang mengatasnamakan kepentingan satu golongan bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, dan sikap-sikap sentimisme, fanatisme, dan anarkisme yang mengatasnamakan suku ataupun agama. Fakta-fakta tersebut menjadi pendorong yang mengikis nilai-nilai keindonesiaan. Data yang memperkuat fakta tersebut adalah salah satunya diperjelas oleh data BPS yang menyebutkan bahwa indeks demokrasi Indonesia menurun dari tahun 2015 sebesar 73,04 menurun di tahun 2016 menjadi 72,81, dan kembali menurun di tahun 2017 menjadi 70,09. (Kompas, 19 Oktober 2017). Salah satu penurunan indeks demokrasi Indonesia disebabkan oleh banyak isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) terutama menjelang Pilkada. Isu tersebut akan menjadi besar seiring penyebaran yang begitu cepat melalui media sosial dan media cetak maupun elektronik, hal tersebut akan menyebabkan pengkotakan golongan masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan semangat kewarganegaraan keindonesiaan.

Perkembangan teknologi komunikasi telah menggeser rasa kewarganegaraan keindonesiaan, hal ini dapat dilihat dari komunikasi dan interaksi yang dibangun antar sesama individu dan masyarakat dimana pada saat ini komunikasi lewat jejaring sosial, sehingga telah menggeser nilai-nilai kolektivitas yang menjadi ciri kewarganegaraan keindonesiaan berubah menjadi nilai-nilai individualistik yang didasarkan pada kepentingan pribadinya. Komunikasi dan interaksi antar sesama anggota keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara telah mengalami transformasi dari kolektivitas menjadi individualitas. Kurangnya nilai-nilai kewarganegaraan keindonesiaan ini terlihat dari sikap-sikap kurang peduli (*respect*) terhadap keadaan di sekelilingnya. Misalnya banyak anak

muda sekarang yang tidak mengenal dan tidak mau bergaul dengan sesama anggota keluarganya, atau tetangga yang tidak mengenal satu sama lain. Hal ini akan menggeser nilai-nilai kehidupan dan kearifan keindonesiaan seperti misalnya ramah tamah, gotong royong, toleransi, saling menolong, dan kesetiaan. Nilai budaya Indonesia yang sangat menonjol yaitu gotong royong telah mengalami pergeseran seiring perubahan zaman, misalnya nilai gotong royong sebagai nilai yang tinggi yang bersumber dari sistem nilai budaya Indonesia menjadikan mentalitas budaya Indonesia sangat konformistis tidak menonjolkan diri satu sama lain dan tidak mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah. Hal ini sangat kontras apabila melihat kenyataan sekarang dimana nilai-nilai gotong royong yang dianggap paling tinggi telah bergeser menjadi nilai-nilai individualistik yang menonjolkan kepentingan individu dibandingkan dengan kepentingan komunitasnya (Koentjaraningrat, 2000). Untuk itu perlu diupayakan bagaimana membangun kewarganegaraan keindonesiaan ini melalui pelibatan kewarganegaraan (*civic engagement*) yang ditransformasikan melalui pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan.

Perubahan sosial yang begitu cepat telah mengubah tatanan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dengan nilai-nilai baru. Hal ini dapat dilihat pada berbagai contoh nilai yang tercermin dalam sikap mahasiswa seperti misalnya kurang peduli (*respect*) terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, kurang memiliki sikap empati kepada sesama, dan lebih cenderung individualis. Contoh sikap tersebut adalah salah satu indikator dari rendahnya pelibatan mahasiswa dalam berbagai masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Kesadaran individu untuk berpartisipasi sangat rendah pada tahun 1920an dan tahun 1930an di Amerika. Pada generasi tersebut tidak terlihat adanya keanggotaan dan partisipasi dalam aktivitas kewarganegaraan (Putnam, 1995, 1996, 2000).

Kurangnya kepedulian pada permasalahan yang ada di sekitarnya terjadi juga pada proses pemilihan umum padahal proses pemilihan umum adalah salah satu indikator untuk mengukur bagaimana pelibatan kewarganegaraan (*civic engagement*) dalam *political voice*, dimana partisipasi warga negara untuk memberikan suara dalam pemilu sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita

demokrasi. Berdasarkan penelitian Lion (2014), pendidikan kewarganegaraan memiliki korelasi terhadap partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilu Presiden tahun 2014 di Kota Palangka Raya sebesar 0,407. Angka tersebut harus lebih ditingkatkan lagi dengan meningkatkan pelibatan kewarganegaraan (*civic engagement*) mahasiswa salah satunya yaitu melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dari beberapa laporan tentang partisipasi politik warganegara dalam pemilihan umum baik pemilu kepala daerah maupun pemilu legislatif menunjukkan adanya tingkat partisipasi dalam kegiatan pemilu yang rendah dari masyarakat karena angka golput semakin bertambah. Sebagai contoh terdapat 6 Provinsi yang tingkat partisipasinya di bawah rata-rata nasional sebesar 72% pada partisipasi pemilihan anggota legislatif tahun 2014 yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Riau, dan Jawa Barat. (Pusat Penelitian Politik LIPI bekerja sama dengan KPU, Desember 2014).

Keterlibatan dalam partisipasi politik mengindikasikan representasi pemerintah secara keseluruhan dan menunjukkan dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah. Penurunan partisipasi politik warga negara yang terjadi sekarang ini salah satunya disebabkan karena fenomena politik yang dihadapi jauh dari cita-cita dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Kepercayaan (*trust*) terhadap politik khususnya dalam memilih pemimpinnya sudah sangat menurun. Fenomena yang mempertontonkan bagaimana keteladanan dari para pemimpin yang lebih mengedepankan sikap menang tidak sikap siap kalah dalam merebut kekuasaan, konflik di internal partai, para pejabat politik yang melakukan pelanggaran hukum, praktek korupsi para pejabat, penegakan hukum yang tidak pasti dan kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan, hal ini menandakan bahwa kegiatan politik yang sesuai dengan cita-cita demokrasi masyarakat masih jauh dari apa yang diharapkan.

Jacoby (2009, hlm. x) menjelaskan "*We must provide opportunities for students to learn about and practice civic engagement so they can create their own civic identities.*" Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengajar harus memberikan peluang kepada mahasiswa untuk belajar tentang dan praktek

pelibatan kewarganegaraan sehingga mereka dapat menciptakan identitas kewarganegaraannya. Pelibatan kewarganegaraan mahasiswa harus dikembangkan dalam kehidupan bertetangga dalam lingkungan masyarakat, apakah sebagai anggota keluarga, anggota sebuah perkumpulan, sukarelawan, anggota atau pemimpin sebuah organisasi, advokat dan aktivis, profesional, politisi, pegawai negeri, dan apakah sebagai pemimpin, pebisnis, serta lingkungan sosial yang diperlukan sebagai bekal untuk mereka. Pengembangan dan pembentukan pelibatan kewarganegaraan (*civic engagement*) tersebut salah satunya diupayakan melalui pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan.

Internalisasi pelibatan kewarganegaraan (*civic engagement*) dapat dilakukan di perguruan tinggi dimana mahasiswa akan memperoleh kebiasaan untuk mendiskusikan permasalahan di lingkungan sekitar, berinteraksi dengan pemerintah dan lembaga kemasyarakatan maupun lembaga negara, serta pemerintah daerah. *Civic engagement* lebih banyak melibatkan mahasiswa dibandingkan dengan siswa sekolah menengah, hal ini telah dibuktikan oleh hasil-hasil penelitian yaitu : 1) Program universitas yang memberikan fasilitas dan kesempatan bagi mahasiswanya memiliki efek positif bagi partisipasi mahasiswa; 2) Universitas memilih mereka yang masuk ke Universitasnya adalah produk unggul yang banyak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan; 3) Mahasiswa memiliki jaringan yang lebih luas untuk berinteraksi dalam kegiatan kemasyarakatan. Levine&Younis (2009), menjelaskan bahwa pengembangan pelibatan kewarganegaraan (*civic engagement*) merupakan tanggungjawab semua masyarakat, dan sekolah atau perguruan tinggi sebagai kunci pokok dalam *engaging civic* dan *political engagement*. Dengan demikian mahasiswa lebih memiliki peranan dalam partisipasi dan keterlibatannya dibandingkan dengan siswa sekolah menengah (Lopez dan Keisa, 2009).

Pentingnya pelibatan kewarganegaraan (*civic engagement*) terutama kaum muda karena melalui pelibatan dalam komunitas (*community engagement*) telah berkontribusi baik dalam pengembangan generasi muda untuk berpartisipasi terhadap bangsa dan negara. Pengetahuan politik merupakan hal yang penting dalam menumbuhkan pelibatan kewarganegaraan. "*Political knowledge is a*

necessary precondition to civic engagement, but information persein unlike to be a sufficient precondition to civic engagement” (Dudley & Gitelson, 2003). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat prakondisi untuk mewujudkan pelibatan kewarganegaraan (*civic engagement*) yakni pengetahuan politik dan jauh lebih penting lagi adalah berkenaan dengan informasi. Jadi, sebenarnya, untuk mengembangkan pelibatan kewarganegaraan (*civic engagement*) maka diperlukan syarat penting yakni berkenaan dengan informasi dan pengetahuan politik. Oleh karena pengetahuan politik merupakan prakondisi untuk mengembangkan pelibatan kewarganegaraan (*civic engagement*). Lebih lanjut Dudley & Gitelson menjelaskan “*furthermore, the long-standing empirical observation that years of formal education are highly correlated with political knowledge seems to support this solution.*” Pendapat di atas, secara eksplisit menegaskan bahwa peranan pendidikan dalam mengembangkan pelibatan kewarganegaraan (*civic engagement*) sangat penting dan merupakan solusi terbaik. Jika dimaknai lebih luas, maka sesungguhnya konsep pelibatan kewarganegaraan (*civic engagement*) tersebut terkait erat dengan warganegara sebagai insan politik (*zoon politicon*) atau sebagai makhluk yang senantiasa bermasyarakat dan bergaul dengan menggunakan berbagai pengaruh yang dimiliki terhadap warga yang lainnya (Arnold, Brooke, and Elissa, 2012; Dudley & Gitelson, 2003).

Merujuk pada pendapat sebelumnya cakupan dari istilah pelibatan (*engagement*) itu sangat luas karena berhubungan dengan aktivitas warganegara dalam berbagai tingkatan lokal, nasional, dan global. Sudah barang tentu pelibatan kewarganegaraan (*civic engagement*) tersebut harus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, setiap warganegara dituntut untuk mampu mengaktualisasikan dimensi-dimensi pelibatan kewarganegaraan (*civic engagement*) tersebut dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tuntutan ini sangat rasional, mengingat warganegara merupakan makhluk politik. Sebagaimana ditegaskan Aristoteles, bahwa manusia itu merupakan *zoon politicon*, yang artinya manusia menurut kodratnya hidup berkelompok. Manusia tidak dapat hidup sendiri tetapi mereka hidup berkelompok dalam lingkup

kehidupan negara, dan hidup bernegara. Seringkali pula istilah *zoon politicon* itu diartikan sebagai insan politik, yang selanjutnya diberikan arti sebagai makhluk yang hidup berkelompok, dalam kelompok masyarakat, juga dalam kelompok negara.

Salah satu contoh mengenai sikap peduli (*respect*) terhadap sesama dapat dilihat dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas. Apakah mereka belajar penuh toleran, menghargai pluralisme, mau bekerjasama, saling membantu, saling menghargai, bertanggung jawab, dan aktif dalam berorganisasi. Sikap tersebut merupakan indikator sikap demokratis mahasiswa yang diperlukan untuk meningkatkan kehidupan berdemokrasi. Pentingnya penanaman nilai-nilai (*values*) yaitu '*democratic values, basic values of our democratic society is freedom of thought*'. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai utama yang harus dibelajarkan untuk membentuk kehidupan yang demokratis (Butts, 1978; Wahab dan Sapriya 2011). Dalam menjalankan kehidupan demokratis perlu didukung oleh lingkungan belajar yang terjadi di kelas Pendidikan Kewarganegaraan sebagai laboratorium demokrasi. Dalam penelitian Sundawa (2011) dijelaskan bahwa kelas Pendidikan Kewarganegaraan sebagai laboratorium demokrasi berpengaruh terhadap kecerdasan berdemokrasi sebesar 46,6%. Ini berarti bahwa pengelolaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas harus diarahkan untuk pembentuk kecerdasan berdemokrasi yang tercermin dalam sikap peduli (*respect*) terhadap sesama yang dilihat dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas. Apakah mereka belajar penuh toleran, menghargai pluralisme, mau bekerjasama, saling membantu, saling menghargai, bertanggung jawab, dan aktif dalam berorganisasi.

Dari hasil penelitian tersebut maka pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas harus dikelola dengan baik sebagai bagian dari kegiatan akademik yang nantinya akan memberikan pengaruh terhadap pembentukan kecerdasan demokrasi mahasiswa yang akan menunjang terhadap pembentukan sikap demokratis yang salah satunya tercermin dalam sikap peduli (*respect*). Dengan demikian pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya dirancang dengan baik, dengan memperhatikan iklim belajar yang

mendukung untuk membentuk sikap demokratis seperti penuh toleran, menghargai pluralisme, mau bekerjasama, saling membantu, saling menghargai, bertanggung jawab, dan aktif dalam berorganisasi, dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh guru atau dosen melalui berbagai strategi belajar baik itu materi, metode, media, sumber, maupun evaluasinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, kecerdasan berdemokrasi akan mendorong sikap dan karakter demokratis mahasiswa yang tercermin dalam sikap kepedulian terhadap sesama yang ditampilkan dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Penjelasan tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa kelas harus dikelola sedemikian baik sehingga dapat memberikan iklim positif dalam pengembangan sikap peduli (*respect*) mahasiswa melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang didorong dengan pengalaman belajar (*learning experience*) yang memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk memiliki sikap peduli terhadap sesama dan lingkungan mereka.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu media untuk menanamkan nilai dan merubah nilai yang ada di dalam masyarakat. Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diperlukan perangkat pengalaman belajar, kurikulum/program belajar. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan secara programatik dapat memandu terjadinya proses pengembangan cita-cita, nilai, konsep dan prinsip belajar melayani. Untuk itu diperlukan upaya mengelola pembelajaran yang menjadi wahana pendidikan dalam konteks pembangunan masyarakat yang bekarakter. Dengan demikian diperlukan proses rekonseptualisasi dan transformasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks pendidikan yang berkarakter di Indonesia untuk membangun kewarganegaraan keindonesiaan. Gagasan Ki Hajar Dewantara mengenai pentingnya pendidikan dalam transformasi budaya adalah untuk menjunjung derajat bangsa perlu didik rakyatnya sehingga akan terwujud tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Rakyat yang kuat maka negara akan makmur. Pengajaran nasional harus selaras dengan penghidupan bangsa (*maatschappelijk*) dan kehidupan bangsa (*cultureel*). Kalau pengajaran bagi anak-anak kita tidak berdasarkan kenasionalan, sudah tentu anak-anak kita tak akan mengetahui keperluan

masyarakat, bangsa, dan negara baik secara lahir maupun batin, lagipula tak mungkin anak-anak itu mempunyai rasa cinta bangsa, dan makin lama makin terpisah dari bangsanya, sehingga kemudian barangkali akan menjadi lawan kita (Ki Hajar Dewantara, 2013).

Berdasarkan gagasan Ki Hajar Dewantara tersebut di atas, perlu adanya suatu *transformasi pedagogis* untuk membentuk kewarganegaraan keindonesiaan yakni pendidikan yang selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa. Dapat penulis pahami bahwa penghidupan dan kehidupan bangsa itu salah satunya adalah terkait dengan nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini dan dipahami sebagai nilai yang melandasi pembentukan kewarganegaraan keindonesiaan, salah satunya adalah nilai sosial-spiritual. Nilai sosial-spiritual tersebut menjadi salah satu acuan dalam menjalin komunikasi dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

Alternatif Pendidikan Kewarganegaraan yang akan dapat membentuk pelibatan kewarganegaraan (*civic engagement*) mahasiswa yaitu pembelajaran warganegara yang bisa diterapkan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dan dalam prosesnya, memantapkan kebiasaan keterlibatan seumur hidup sebagai pemberdayaan, melekat informasi, dan tanggung jawab sosial warga negara. Inilah yang disebut dengan model spiral pembelajaran warganegara. Model spiral dibedakan oleh prinsip-prinsip antarkegiatan dan integrasi, spiral memiliki enam elemen atau cabang yaitu : (1) diri sendiri; (2) komunitas dan kebudayaan; (3) pengetahuan; (4) keterampilan; (5) nilai-nilai; (6) tindakan umum. Enam elemen itu saling berdampingan secara bersamaan yang ditandai dengan saling berhubungan diantara elemen-elemen tersebut (Musil, 2009).

Selanjutnya Musil (2009) memberikan penjelasan tentang capaian dari masing-masing elemen dari model pembelajaran kewarganegaraan spiral. Hasil/capaian untuk pembelajaran warganegara tentang diri : (1) Memahami bahwa diri merupakan bagian yang melekat dalam hubungan, lingkup sosial, dan bagian penting dari sejarah yang spesifik; (2) Kesadaran akan identitas diri dalam hubungannya untuk pewarisan dan komunitas pilihan sendiri; (3) Kemampuan untuk mengekspresikan salah satu pilihannya yang berdampak pada perubahan;

(4) Sikap untuk menjadi aktif dalam hal menjadi orang yang peduli terhadap berbagai hal; dan (5) Kemampuan untuk mandiri dan berkomitmen.

Hasil/capaian untuk pembelajaran warganegara tentang komunitas dan kebudayaan antara lain : (1) Menghargai sumber-sumber kekayaan dan kearifan dari keragaman komunitas dan kebudayaan; (2) Memahami bagaimana komunitas dapat juga menentukan dan membatasi; (3) Rasa keingintahuan untuk belajar tentang perbedaan kelompok secara lokal dan global; (4) Keinginan untuk berubah dari zona nyaman ke zona yang senantiasa terhubung melalui keterikatan hukum yang membagi/mengatur; dan (5) Kemampuan untuk menjelaskan perbandingan tradisi-tradisi kewarganegaraan yang diekspresikan ke dalam dan melalui kelompok-kelompok budaya yang berbeda.

Hasil/capaian pembelajaran warganegara tentang pengetahuan antara lain : (1) Mengakui bahwa pengetahuan adalah dinamis, berubah dan perlu dievaluasi secara konsisten; (2) Memahami bahwa pengetahuan dibangun secara sosial dan diimplikasikan dengan kekuatan/kekuasaan; (3) Familiar dengan kunci perjuangan historis, kampanye, dan gerakan-gerakan sosial untuk mencapai harapan dari demokrasi; (4) Pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip pokok dan alasan utama tentang demokrasi sepanjang waktu; dan (5) Kemampuan untuk menjelaskan perdebatan intelektual kewarganegaraan yang memerlukan pemecahan.

Hasil/capaian dari pembelajaran warganegara tentang keterampilan antara lain : (1) Penerapan berpikir kritis, penyelesaian konflik, dan metode kerjasama; (2) Kemampuan untuk mendengarkan secara mengesankan dan berbicara dengan kepercayaan diri; (3) Keterampilan dalam bermusyawarah, dialog, dan membangun komunitas; (4) Mengembangkan imajinasi kewarganegaraan; dan (5) Kemampuan untuk bekerja dengan baik melampaui keragaman perbedaan-perbedaan.

Hasil/capaian untuk pembelajaran warganegara tentang nilai-nilai antara lain: (1) Menjelajahi secara serius dan melakukan refleksi tentang nilai-nilai personal yang inti; (2) Mengecek nilai-nilai personal dalam konteks memajukan kebaikan umum; (3) Mendukung aspirasi-aspirasi keadilan demokratis, peluang-

peluang, kebebasan, dan keadilan untuk semua; (4) Mengembangkan kualitas karakter, integritas, empati, dan harapan; dan (5) Kemampuan untuk jalan menegosiasi dimana antarbidang kehidupan saling bertabrakan.

Hasil/capaian untuk pembelajaran warganegara tentang tindakan umum antara lain : (1) Memahami untuk, berkomitmen, dan kemampuan untuk hidup dalam konteks kelompok masyarakat; (2) Sikap untuk menciptakan dan berpartisipasi dalam struktur tata kelola sekolah yang demokratis, perguruan tinggi dan komunitas; (3) Mempraktekkan kewarganegaraan dengan tertib yang dipandu untuk membangun partisipasi dalam komunitas dalam hal kehidupan dan bekerja; (4) Menyusun strategi ganda dalam bertindak (melayani, membela, perubahan kebijakan) untuk mencapai kepentingan/tujuan umum; (5) Merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan diantara tindakan umum; (6) Mengembangkan keberanian moral dan politik terhadap risiko untuk mencapai kebaikan/tujuan bersama; dan (7) Menentukan pentingnya isu-isu etis dan pertanyaan-pertanyaan dalam hal dan tentang kehidupan umum.

Warga negara yang berpartisipasi akan meningkatkan kepercayaan dan efikasi diri mereka, dan akan membawa dampak perubahan dalam masyarakat disebabkan karena mereka terlibat. Kurangnya kepedulian mereka pada permasalahan yang ada di lingkungannya yang merupakan bentuk tanggung jawab mahasiswa sebagai warga negara pada lingkungan sekitar telah mendorong perguruan tinggi untuk lebih fokus terhadap pembelajaran yang lebih banyak melibatkan mahasiswa dalam permasalahan masyarakat di lingkungan lokal, nasional, dan global, untuk meningkatkan kehidupan demokrasi dan kesadaran kewarganegaraan melalui upaya pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan.

Untuk terlibat dalam kegiatan dan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat, dibutuhkan tidak hanya pengetahuan dan kecakapan, tetapi juga dibutuhkan nilai-nilai, motivasi, dan komitmen untuk terlibat dan bermanfaat bagi masyarakat melalui interaksi sosial yang bermakna. Setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya, untuk membangun bangsa dan negaranya dengan menjalin kerja sama dan melibatkan diri dalam kegiatan-

kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya yang bersifat edukatif untuk pengembangan masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan sebuah proses pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan. Smidt (1999) menjelaskan bahwa pendidikan sangat berhubungan sekali dengan pengembangan kepercayaan sosial dan keterlibatan sosial, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi keyakinan dirinya untuk terlibat. Pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan harus dapat membentuk pribadi individu menjadi lebih baik dan memiliki karakter yang baik, tidak mengubah nilai-nilai yang sudah baik khususnya nilai *respect*, dan empati terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya yang menjadi fondasi bagi keterlibatannya dalam permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian kebermaknaan proses Pendidikan Kewarganegaraan harus memberikan kontribusi positif terhadap internalisasi nilai-nilai yang baik, dan pembentukan sikap atau keterlibatan mahasiswa dalam berbagai permasalahan yang ada di lingkungannya.

Upaya yang dilakukan perguruan tinggi untuk membentuk sikap peduli (*respect*), dan keterlibatan mahasiswa melalui Pendidikan Kewarganegaraan sebagian besar tidak efektif apabila tidak didukung oleh cara-cara di mana Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan, pentingnya kesempatan untuk membahas kejadian terkini, membentuk kebijakan perguruan tinggi, dan melakukan partisipasi politik adalah kritik pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang menggunakan metode pengajaran di mana mahasiswa adalah penerima pengetahuan yang pasif tidak konsisten dengan keaktifan kewarganegaraan dalam kehidupan demokrasi. Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu mengembangkan kompetensi kewarganegaraan yang akan membentuk karakter siswa. Terdapat tiga kompetensi yang dipaparkan oleh Syvertsen, Constance & Michael (2007) yaitu : (1) Kemampuan kewarganegaraan meliputi (kemampuan berkomunikasi, bermufakat, analisis kritis terhadap informasi politik); (2) Keterlibatan kewarganegaraan (simulasi pemilu, keterlibatan dalam pemilu, keterlibatan dalam berbagai kegiatan komunitas); (3) Kesadaran akan isu dan konsep kewarganegaraan (isu lokal, isu kepemudaan, konsep Pendidikan Kewarganegaraan, isu internasional, isu persaingan, dan peristiwa nasional yang

sedang terjadi). Dengan demikian kompetensi kewarganegaraan harus diarahkan sebagai upaya untuk membentuk dan memotivasi keterlibatan warga negara pada berbagai kegiatan di masyarakat, untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara.

Untuk mencapai kompetensi kewarganegaraan tersebut di atas, perlu ada upaya yang terorganisir melalui pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki tujuan untuk *nation and character building*. Model Belajar Melayani (MBM) yang diadopsi dari model *service learning* adalah satu inovasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yang berorientasi tidak hanya untuk membentuk *civic knowledge* mahasiswa tetapi harus lebih diupayakan untuk membentuk *civic attitude dan civic behavior* mahasiswa, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Asumsi tentang Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana dan instrumen untuk mengalihkan atau mentransfer ilmu pengetahuan bukan hanya telah mereduksi makna hakiki dan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi juga telah membuat mahasiswa kehilangan daya kritisnya. Pendidikan Kewarganegaraan sejatinya adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi mahasiswa agar memiliki karakter, integritas, dan kompetensi yang bermakna dalam kehidupan. Namun yang terjadi selama ini Pendidikan Kewarganegaraan masih terjebak pada pembelajaran yang berorientasi pada aspek pengetahuan saja, belum banyak mengembangkan aspek afektif, dan psikomotorik. Pengembangan kompetensi kewarganegaraan menurut Cogan (1998) harus difokuskan pada pembentukan konsepsi kewarganegaraan yang multidimensional, yang menekankan kepada kerjasama antara sekolah atau perguruan tinggi dengan masyarakat. Empat dimensi kewarganegaraan multidimensional tersebut bersifat personal, kemasyarakatan, sementara, dan terbatas menurut ruang dan waktu (Wahab dan Sapriya, 2011). Dengan demikian, praktek pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus lebih diarahkan pada pembentukan warganegara multidimensional yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kebajikan warga negara melalui internalisasi nilai kemanusiaan, keluhuran, kejujuran, kepedulian,

dan keadaban yang diperlukan untuk membangun karakter mahasiswa dan karakter bangsa pada umumnya melalui keterlibatan mereka dalam masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan harus mempunyai tata kelola untuk memperkaya dan meningkatkan kehidupan yang lebih beradab. Pengembangan nilai-nilai kepedulian terhadap sesama di perguruan tinggi juga perlu diterapkan untuk menghadapi era globalisasi yang kini diyakini akan menghadirkan banyak perubahan global seiring dengan akselerasi keluar masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia. Itu artinya, praktek Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter bangsa (*nation and character building*) harus diupayakan untuk menyiapkan generasi yang peduli (*respect*), sehingga memiliki daya tahan (*resistence*) yang kokoh di tengah-tengah konflik peradaban. Hasil belajar harus ditekankan kepada pemahaman budaya tentang konsep keadilan, kebebasan, dan perdamaian merupakan nilai-nilai dasar yang seyogyanya dikembangkan dan menjadi landasan dalam meningkatkan semangat kebersamaan antar sesama umat manusia, saling perhatian, pengertian, dan tolong menolong. Nilai-nilai tersebut harus dimiliki oleh individu sebagai warga global bisa melalui Pendidikan Kewarganegaraan ataupun output dari pendidikan secara umum. Kompetensi warga internasional dapat dikuasai dan menyatu dalam diri setiap warga negara, maka terdapat sejumlah prosedur diantaranya : (1) *Acquiring and using information*; (2) *Assessing involment*; (3) *Making decisions*; (4) *Making judgment*; (5) *Communicating*; (6) *Cooperating*; (7) *Promoting interest*. Dengan sejumlah kompetensi tersebut partisipasi warga negara dapat lebih terarah dan berkualitas baik sebagai warga negara dari negara sendiri maupun sebagai warga negara masyarakat dunia (Wahab & Sapriya, 2011)

Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan untuk mencapai dua sasaran pokok yang seimbang. Pertama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa tentang etika, moral, dan asas-asas dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kedua, membentuk sikap, perilaku, dan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kedua sasaran ini hendaknya dapat dicapai secara holistik agar mahasiswa tidak hanya sekedar memahami konsep dan prinsip keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi juga agar mahasiswa memiliki

kemampuan berbuat sesuatu yang bermanfaat dengan menggunakan konsep dan prinsip keilmuan yang telah dikuasainya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Kewarganegaraan selayaknya dapat membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai, yang memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab dalam berbagai dimensi kehidupan sehingga dapat membentuk sikap peduli (*respect*). Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat membentuk budaya kewarganegaraan yang lebih peduli (*respect*). Salah satu unsur dari budaya kewarganegaraan adalah '*civic virtue*' atau kebajikan atau akhlak kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan. Semua unsur akhlak kewarganegaraan itu diyakini akan berpengaruh dalam membentuk warga negara yang baik (*to be good citizenship*), sehingga akan memupuk kehidupan (*civic community*' atau '*civil society*) atau masyarakat madani untuk Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa dan merupakan mata kuliah kelompok kepribadian yang bertujuan untuk *nation and character building*. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Pendidikan Tinggi dalam UU No 12 tahun 12 yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Substansi dari pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi harus diarahkan pada bagaimana menjadikan warga negara yang mampu berpartisipasi secara efektif, cerdas, demokratis dan bertanggung jawab. Kompetensi warga negara tersebut sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Alenia 4 yakni untuk melindungi segenap bangsa, Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi, kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih belum sesuai dengan harapan dalam mengembangkan *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*. Ketiga kompetensi tersebut akan sinergis dapat dicapai apabila pelibatan kewarganegaraan (*civic engagement*) sudah terwujud. Hal itu didukung oleh sejumlah kajian empirik di lapangan tentang keberadaan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di lapangan yakni masih adanya suatu kesan yang ditangkap mahasiswa bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tidak menarik dan membosankan, sangat mudah untuk mendapatkan nilai, tidak sesuai dengan realita kehidupan berdasarkan perkembangan peserta didik. Seperti data yang diperoleh dari hasil observasi awal penulis maupun hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penerapan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih dipengaruhi pembelajaran-pembelajaran yang konvensional sehingga pembelajaran hanya berorientasi pada materi (*content*), pembelajaran kurang menyentuh dan mengembangkan kemampuan berfikir kritis mahasiswa, dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan yang bermanfaat di masyarakat. Selama ini pembelajaran PKn terkesan kaku, kurang fleksibel, berisi hafalan dan membosankan. (Fathurrahman, 2009)
2. Pembelajaran masih banyak dilakukan secara informatif atau dosen yang mendominasi pembelajaran (*teacher centered*) sedangkan mahasiswa pasif. (Siskandar, 2009 & Dwiningrum, R.N 2009)
3. Kecenderungan pada domain kognitif dimana pendidikan afektif dan psikomotor (keterampilan) kurang mendapat tempat yang seimbang. Kecenderungan demikian mengakibatkan lemahnya pengembangan potensi mahasiswa dalam pembelajaran khususnya untuk mendukung keterlibatan mahasiswa dan partisipasi mahasiswa terhadap masyarakat. (Trisiana, 2015)

Keberhasilan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan lebih bermakna apabila sudah mampu melibatkan mahasiswa dalam setiap praktek kehidupan yang lebih kontekstual melalui jasa mahasiswa seperti mahasiswa menjadi seorang relawan, kepemimpinan mahasiswa melalui organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus, mahasiswa membuat keputusan, kedermawanan mahasiswa, keterlibatan mahasiswa dalam bidang politik misalnya dalam organisasi pemuda, mahasiswa menjadi jurnalis yang mengembangkan dan menyebarkan berita di jejaring sosial, dan kegiatan lainnya. Keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan harus dikembangkan melalui kegiatan belajar seperti : *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together* (UNESCO). Kegiatan belajar tersebut akan dapat tercapai apabila mahasiswa mempunyai kesadaran dan kemauan untuk belajar memberikan manfaat kepada orang lain.

Model Belajar Melayani (MBM) yang baik kepada semua orang adalah menjadi tanggung jawab kita semua, dan akan menjadi dasar bagi terbentuknya budaya birokrasi yang tulus, pengabdian yang tanpa pamrih, atupun hormat kepada sesama dengan tidak membedakan status sosialnya. Berdasarkan pengalaman penulis ketika berkunjung ke salah tempat, penulis mempunyai simpati ketika seorang pejabat yang ada di salah satu universitas yang memiliki kerendahan hati untuk membukakan pintu bagi mahasiswanya yang datang bersamaan dengan dirinya tetapi beliaulah yang membukakan pintu terlebih dahulu dan tetap membuka pintu sebelum mahasiswanya melewati pintu tersebut. Pemandangan tersebut sangat berbeda dengan realitas sosial di Indonesia, stratifikasi sosial terlihat apabila ada rombongan pejabat yang datang ke suatu daerah, pelayanan yang kadangkala di luar batas kewajaran selalu diberikan kepada pejabat. Padahal seharusnya karakter untuk memiliki kepedulian dengan adanya keinginan untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada semua orang adalah menjadi tanggung jawab semua orang, dan akan menjadi dasar bagi terbentuknya budaya birokrasi yang tulus, pengabdian yang tanpa pamrih, atupun hormat kepada sesama dengan tidak membedakan status sosialnya.

Model Belajar Melayani (MBM) adalah salah satu cara untuk mendorong keterlibatan mahasiswa. Model Belajar Melayani (MBM) akan mengeksplorasi potensi layanan pembelajaran untuk mencapai pembelajaran akademik dan sipil serta menumbuhkan apresiasi tulus mereka untuk belajar dan bekerja di dalam tim, dan menghubungkan kelas mereka dengan kebutuhan masyarakat. Penerapan Model Belajar Melayani (MBM) di dalam pembelajaran akan meningkatkan komitmen mahasiswa terhadap pelayanan masyarakat, meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran secara akademik, dan meningkatkan rasa kewarganegaraan mereka. Model Belajar Melayani (MBM) mengintegrasikan tujuan pembelajaran dengan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan juga dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa rekomendasi Vaughn (2010), terkait dengan pelaksanaan Model Belajar Melayani (MBM) adalah : (1) pra-rencana yaitu dengan menemukan proyek di dalam komunitas; (2) mempertimbangkan keberhasilan proyek layanan masyarakat tersebut; (3) mengembangkan manajemen proyek (proposal, jadwal, anggaran); (4) pertemuan kelas sebagai pertemuan kelompok untuk menentukan time limit proyek layanan masyarakat; (5) melakukan proyek komunitas; (6) perubahan pola pembelajaran yang lebih ditekankan pada kerja tim (Vaughn, 2010).

Model Belajar Melayani (MBM) akan mendorong peningkatan pelibatan kewarganegaraan mahasiswa karena dengan Model Belajar Melayani (MBM) orientasi mereka untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart and good citizen*) dipengaruhi oleh sosialisasi dalam komunitas dan pengalaman belajar (*learning experience*) mereka secara langsung dalam kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan lingkungan. Dengan pengalaman belajar (*learning experience*) tersebut akan mendorong pemahaman mereka terhadap permasalahan sosial yang dikaitkan dengan kompetensi akademik yang dimilikinya, sehingga akan membentuk kompetensi kewarganegaraan mahasiswa yang lebih bermakna. Dengan demikian kegiatan proyek mahasiswa untuk melayani di komunitas akan meningkatkan pelibatan kewarganegaraan keindonesiaan. Dalam hal ini Wang dan Rodgers (2006) menjelaskan bahwa pemahaman kognitif mahasiswa terkait keadilan sosial akan meningkat dengan

Model Belajar Melayani (MBM). Demikian juga dengan pendapat Ryan & Grotrian (2012) menjelaskan bahwa belajar melayani akan membuat pengalaman belajar mahasiswa terutama dari kemampuan untuk mengubah proses berfikir, kemampuan untuk menunjukkan pergeseran kognitif, dan kemampuan untuk berfikir empati. Pergeseran kognitif terjadi karena mahasiswa mampu mendorong praduga karena pengalamannya, dan tidak dijadikan gaya hidup yang statis dengan praduga awal. Pergeseran kognitif tersebut akan menjadikan mahasiswa memiliki keinginan untuk terus memberi layanan sebagai dasar kepuasan dan kebaikan dirinya. Diperlukan upaya yang lebih banyak untuk melibatkan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Seperti halnya dalam pemikiran pragmatisme, yang menjelaskan bahwa dalam pendidikan memerlukan suatu pengalaman sebagai sebuah instrumen yang nyata dari mahasiswa untuk bisa merubah tatanan nilai yang ada di dalam dirinya, dan bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan jelek melalui stimulus pembiasaan lewat pengalamannya sendiri. Pengalaman akan terbentuk dari penerapan seluruh pengetahuan yang diperoleh secara kognitif, dengan realitas sosial yang membutuhkan upaya pemecahan masalah.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dan tujuan pendidikan pada umumnya menempatkan hakikat nilai Ketuhanan sebagai nilai utama terlihat dari bagaimana menempatkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berahlaq mulia menjadi *core* dan kunci dari tujuan pendidikan di Indonesia. Hal ini juga yang membedakan Indonesia dan negara lain, dimana dalam semua sendi kehidupan termasuk pendidikan di Indonesia menempatkan nilai-nilai Ketuhanan atau nilai spiritual menjadi inti dan payung bagi pembentukan kompetensi manusia Indonesia dalam Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Tumanggor (2012) memberikan penjelasan bahwa nilai spiritual adalah merupakan nilai dan norma yang tertinggi (*ultimate norm and value*) dalam suatu kebudayaan masyarakat dan menjadi acuan dalam semua sektor kehidupan yang lainnya. Hal ini juga dipertegas oleh Van Vollenhoven (1874-1993) dalam bukunya *Adatrecht*, bahwa : ‘Budaya suatu bangsa adalah merupakan ‘resepsi’ dari pengaruh ajaran (pesan-pesan) dan tata

cara berperilaku dalam beragama yang dianut oleh bangsa atau masyarakat tersebut. Dengan demikian bahwa ruh dan nafas kebudayaan sesungguhnya adalah nilai spiritual.

Selain nilai spiritual, untuk mewujudkan kebudayaan manusia yang menempatkan nilai spiritual sebagai nilai dan norma tertinggi tersebut, harus menempatkan nilai-nilai sosial yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam. Nilai-nilai sosial tersebut adalah yang diperlukan untuk hubungan individu dengan individu lain agar tercipta harmoni secara sosial. Sedangkan nilai spiritual lebih tercermin dalam hubungan individu dengan Tuhannya. Kedua nilai tersebut baik nilai sosial maupun nilai spiritual harus secara sinergi melekat dalam karakter keindonesiaan, dan harus diupayakan melalui pendidikan, salah satunya adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan demikian tidak dapat dipisahkan bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan juga harus dipayungi oleh nilai-nilai sosial-spiritual yang diyakini oleh masyarakat. Dalam mencapai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut, maka secara holistik harus mengkaji dan menjelaskan konten materi dari berbagai pandangan keilmuan. Hal ini juga sesuai dengan makna dari Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan bidang kajian yang bukan monodisiplin ilmu tetapi merupakan kajian yang multidisipliner, interdisipliner, dan bahkan transdisipliner. Untuk mengantisipasi tantangan perubahan kebudayaan yang akan sedang terjadi dan akan terjadi pada generasi muda maka harus diperkuat pendidikan karakter bangsa yang sesuai dengan ideologi bangsa dan negara yaitu Pancasila. Rumusan Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan payung yang menjadi dasar dalam pengembangan nilai-nilai pada sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengembangan Model Belajar Melayani (MBM) Berbasis Nilai Sosial-Spiritual untuk Memperkokoh Pelibatan Kewarganegaraan Keindonesiaan”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Bertolak dari latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini terkait dengan ‘Pembangunan Model Belajar Melayani (MBM) Berbasis Nilai Sosial-Spiritual Untuk Memperkokoh Pelibatan Kewarganegaraan Keindonesiaan’ sebagai berikut.

1. Bagaimanakah gambaran pelibatan kewarganegaraan keindonesiaan mahasiswa di Universitas Palangka Raya?
2. Bagaimana pengembangan Model Belajar Melayani (MBM) berbasis nilai sosial-spiritual dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk memperkokoh pelibatan kewarganegaraan keindonesiaan mahasiswa di Universitas Palangka Raya?
3. Bagaimana Efektifitas Implementasi Model Belajar Melayani (MBM) berbasis nilai sosial-spiritual untuk memperkokoh pelibatan kewarganegaraan keindonesiaan mahasiswa di Universitas Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut

1. Mengkaji dan menganalisis gambaran pelibatan kewarganegaraan keindonesiaan mahasiswa di Universitas Palangka Raya.
2. Mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi Model Belajar Melayani (MBM) berbasis nilai sosial-spiritual dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk memperkokoh pelibatan kewarganegaraan keindonesiaan mahasiswa di Universitas Palangka Raya.
3. Mengetahui dan menganalisis efektifitas implementasi Model Belajar Melayani (MBM) berbasis nilai sosial-spiritual untuk memperkokoh pelibatan kewarganegaraan keindonesiaan mahasiswa di Universitas Palangka Raya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini, dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Melalui analisis akademik baik secara teoritis dan praktis, akan diperoleh suatu temuan/data yang dapat dijadikan sebagai suatu acuan atau landasan untuk mengembangkan dan meningkatkan kajian bidang keilmuan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan, dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Palangka Raya mengenai inovasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terkait dengan Model Belajar Melayani (MBM) berbasis nilai sosial-spiritual untuk memperkokoh pelibatan kewarganegaraan keindonesiaan mahasiswa di Universitas Palangka Raya
3. Sebagai bahan pemikiran bagi lembaga terkait khususnya Universitas Palangka Raya dalam menentukan kebijakan ke depan terutama untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang akan memperkokoh pelibatan kewarganegaraan keindonesiaan.
4. Sebagai wahana untuk menambah pengalaman belajar (*learning experience*) khususnya bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan menulis dan meneliti dan menghasilkan karya ilmiah yang akan mendukung terhadap pencapaian Tri Dharma Pendidikan Tinggi.

E. Struktur Organisasi Disertasi

Disertasi ini terdiri atas susunan atau sistematika penulisan sebagai berikut.

1. Bab 1 Pendahuluan terdiri sebagai berikut.
 - a. Latar Belakang Penelitian : berisi gambaran permasalahan melemahnya pelibatan kewarganegaraan keindonesiaan yang terdiri dari nilai-nilai, perasaan, dan sikap yang menggambarkan pelibatan kewarganegaraan keindonesiaan dalam semua aspek kehidupan sosial dan politik dalam

lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam latar belakang penelitian juga digambarkan bagaimana permasalahan tersebut harus diupayakan penyelesaiannya melalui transformasi pendidikan kewarganegaraan dalam perguruan tinggi yang menggunakan Model Belajar Melayani (MBM) berbasis nilai sosial-spiritual untuk memperkokoh pelibatan kewarganegaraan keindonesiaan tersebut. Nilai sosial-spiritual menjadi nilai-nilai yang dianggap memiliki identitas karakteristik dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

- b. Rumusan Masalah Penelitian : menjelaskan secara rinci permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian disertasi ini yaitu meliputi beberapa asumsi peneliti terkait dengan masalah yang menyangkut menurunnya pelibatan kewarganegaraan keindonesiaan khususnya pada mahasiswa Universitas Palangka Raya, perlu dikembangkan Model Belajar Melayani (MBM) berbasis nilai sosial-spiritual untuk memperkokoh pelibatan kewarganegaraan keindonesiaan mahasiswa universitas Palangka Raya, perlu dilakukan suatu evaluasi dalam implementasi model belajar melayani (MBM) di kelas eksperimen untuk mengetahui efektifitas dari Model Belajar Melayani (MBM) berbasis nilai sosial-spiritual tersebut dalam memperkokoh pelibatan kewarganegaraan keindonesiaan.
- c. Tujuan Penelitian : menggambarkan secara jelas tujuan penelitian yang harus tercapai dalam penelitian disertasi ini sesuai dengan indikator-indikator yang ada dalam rumusan masalah penelitian.
- d. Manfaat Penelitian : menggambarkan kegunaan dan kebermanfaatn hasil penelitian yang diperoleh baik secara teoritis dan praktis dalam pengembangan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan maupun secara praktis dalam pelaksanaan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi.
- e. Struktur Organisasi Disertasi : berisikan sistematika penulisan disertasi secara utuh dari Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III metode Penelitian, Bab IV Temuan dan Pembahasan, dan Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi.

2. Bab 2 : Dalam bab 2 dipaparkan kerangka teoritis secara filosofis maupun konseptual, yang dijadikan sebagai landasan berpijak dalam melakukan penelitian disertasi ini. Landasan teoritis yang dikembangkan adalah terkait dengan urgensi dan aktualisasi nilai-nilai keindonesiaan, filosofi Model Belajar Melayani (MBM) dan pelibatan kewarganegaraan keindonesiaan, teori belajar yang melandasi Model Belajar Melayani (MBM) dan pelibatan kewarganegaraan keindonesiaan, konsep dan teori Model Belajar Melayani (MBM), nilai sosial-spiritual sebagai urgensi dalam kehidupan manusia kaitannya dengan Model Belajar Melayani (MBM) dan pelibatan kewarganegaraan keindonesiaan, konsep dan teori pelibatan kewarganegaraan, keterkaitan pelibatan kewarganegaraan keindonesian dengan Model Belajar Melayani (MBM) dalam Pendidikan Kewarganegaraan, dan terakhir digambarkan bagaimana kerangka penelitian setelah memahami kerangka teoritis konsep penelitian.
3. Bab 3 : digambarkan secara jelas bagaimana penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang jelas, desain atau prosedur yang jelas, lokasi dan sampel yang dipilih berdasarkan rujukan teoritis, instrumen dan teknik penelitian, serta analisis data yang disesuaikan dengan data penelitian.
4. Bab 4 : akan digambarkan temuan penelitian di lapangan yang didasarkan pada beberapa tujuan penelitian. Temuan di lapangan berupa semua data yang diperoleh dari instrument penelitian baik angket, pedoman wawancara, pedoman observasi maupun dokumentasi disajikan dengan jelas setelah melalui analisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil temuan penelitian tersebut akan diparafrase dengan teori yang relevan sehingga akan dihasilkan proposisi-proposisi peneliti sampai kepada asumsi maupun generalisasi.
5. Bab 5 : dalam bab ini digambarkan simpulan penelitian secara jelas, bagaimana implikasinya, serta rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait dengan penelitian yang telah dilakukan, serta dalil yang dihasilkan.